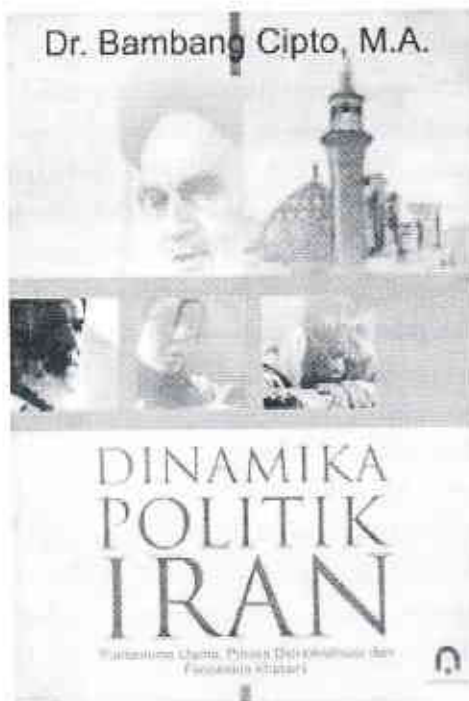


Demokrasi Islam Iran: Dari Eksperimen Politik ke Wacana Tanding

Oleh Iskandar Zulkarnain

JUDUL BUKU :Dinamika Politik Iran Puritanisme Ulama, Proses Demokrasi dan Fenomena Khatarni
PENULIS :Dr. Bambang Cipto, M.A.
CETAKAN I : Juni 2004
PENERBIT :Pustaka Pelajar
HALAMAN :V + 123



Selama ini terdapat asumsi besar sebagian pengamat Barat yang meyakini bahwa mustahil sebuah demokrasi akan muncul di negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Pemberian *stereotype* tersebut berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar demokrasi yang tidak dimiliki dalam ajaran Islam, dan tidak dikenalnya konsep sekularisme barat yang memisahkan antara urusan negara dari agama.

Kenyataannya, pengalaman demokrasi bukan sesuatu yang ahistoris di negeri-negeri Islam. Betapa tidak, sebuah fenomena eksperimen demokrasi yang sangat monumental di Iran dalam sepuluh tahun terakhir ternyata memperlihatkan perubahan-perubahan menakjubkan yang luput dari perhatian dunia Barat dan umat Islam di luar Iran. Padahal, pengalaman Iran dalam

membangun demokrasiya memberi banyak kontribusi yang signifikan terhadap perubahan politik di negara-negara yang mayoritas muslim seperti Indonesia, Malaysia dan sebagainya. Bagaimana Iran membangun demokrasiya?

Buku ini memberikan deskripsi tentang dinamika demokrasi di Iran. Maju mundurnya demokrasi di Iran ternyata sangat dipengaruhi oleh peran bahasa politik para mullah, peran institusi-institusi politik utama Iran dan munculnya perseteruan kubu konservatif dan kubu reformis.

Peran bahasa politik para mullah sangat besar. Bahasa lisan memberi konsekuensi hukum yang bersifat mengikat dan tidak boleh dibantah. Berani membantah perkataan para mullah memberi dampak sangat keras bahkan secara fisik. Ayatollah Khomeini adalah salah satu dari para mullah yang berjaya dan sangat menentukan jalannya revolusi Iran yang mendominasi bahasa politik kaum ulama, sehingga proses demokrasi terhambat di tengah sistem politik otoritas tunggal Khomeini.

Penyimpangan revolusi dari harapan besar rakyat Iran membawa secara sporadis kebutuhan akan perubahan visi, strategi dan kebijakan politik Republik Islam Iran. Keinginan besar tersebut didorong ketidakpuasan seju-

mlah ayatollah sepuh terhadap pondasi ideologis Republik Islam Iran mengenai konsep *velayat-e-faqih* atau "pemerintahan yang dijalankan oleh para fuqaha (ahli hukum)" yang dianggap hanya inovasi pribadi Khomeini yang tidak didukung Ayatollah sepuh, serta bertentangan dengan apa yang diajarkan Ali bin Abi Thalib.

Dari konflik tersebut muncullah oposisi Khomeini. Shariatmadari adalah salah satu ayatollah sepuh penentang utamanya. Adanya perbedaan dasar yang terjadi di antara keduanya, menyangkut isu penerapan hukum-hukum Islam ke dalam kehidupan nyata. Shariatmadari berasumsi bahwa revolusi adalah alat untuk menghancurkan rejim diktator dan menggantikannya dengan pemerintahan demokrasi Islam, dimana rakyat diberi kesempatan dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam politik. Sebaliknya, posisi para ulama sebatas pada pemberian nasehat, arahan dan petunjuk serta tidak punya hak tanpa batas dalam hal kekuasaan (politik). Khomeini berseberangan dengan pendapat Shariatmadari, sehingga dalam bahasa politik para pendukung fanatik Khomeini, orang ini bahkan pantas untuk dihukum mati. Kritik Shariatmadari tidak berhenti dengan kematiannya, dan tetap hidup di kalangan mullah lainnya.

Peran *kedua*, institusi-institusi poli-

itik utama Iran. Peran institusi-institusi yang didominasi oleh mullah garis keras yang menentang demokratisasi di Republik Islam Iran. Institusi-institusi tersebut adalah *pertama*, konstitusi. Secara teoritis Republik Islam Iran merupakan negara yang berbasis konstitusi yang mendukung gagasan demokrasi dan melindungi hak-hak rakyat Iran. Namun, dalam praktik, pernyataan dan ketetapan sang Pemimpin tertinggi berlaku sama tinggi, bahkan lebih tinggi nilainya dari ketetapan yang tertulis di dalam konstitusi. Bahkan tragisnya, konstitusi hanya difungsikan sebagai ornamen politik, sedangkan implementasinya tergantung pada penafsiran Pemimpin tertinggi dan kaum konservatif yang sesuai dengan agenda politik mereka.

Kedua, pemimpin spiritual. Lembaga pemerintahan tertinggi Iran adalah institusi politik paling dominan dan tidak ada tandingannya yang dipersonifikasikan oleh Imam Khomeini. Konstitusi yang ada sekalipun berada di bawah posisi *the supreme leader*, Khomeini. Posisi pemimpin spiritual sangat kuat, sehingga mampu mendorong seseorang ke dalam posisi menentukan atau menjatuhkannya tanpa dicegah oleh hukum sekalipun. Agenda demokrasi tidak pernah berkembang, karena posisi pemimpin spiritual dengan kekuasaan mutlak yang bertentangan dengan prinsip

demokrasi yang menentang sentralisasi kekuasaan pada satu orang penguasa.

Ketiga, Dewan Pengawal. Lembaga yang terdiri dari enam ahli kaum mullah konservatif yang bertugas mengawasi proses legislasi di Majelis. Mereka diangkat oleh pemimpin spiritual dan berhak mendukung atau menentang keputusan majlis serta berkuasa mendiskualifikasi calon-calon presiden maupun calon-calon majlis. Dewan Pengawallah yang sering memanfaatkan data-data hasil penelitian Pusdaran dan Basij (ujung tombak garis keras dalam urusan disiplin masyarakat dan intelijen) untuk menjegal caleg-caleg yang tidak mereka kehendaki. Bahkan, proses penghitungan suarapun berada dibawah kendali Dewan Pengawal, sehingga mampu memaksa personil kementerian dalam negeri untuk mengikuti kehendak Dewan Pengawal dalam menindas lawan-lawan politiknya (baik kubu kiri maupun kubu reformis).

Keempat, Majelis (Parlemen Iran) adalah salah satu dari institusi utama pada Republik Islam Iran yang didominasi kubu konservatif dan menguasai posisi Pemimpin Tertinggi (rahbah), Dewan Pengawal, Kementerian Kehakiman dan Institusi Keamanan. Majelis sebagai lembaga politik negara yang bersifat independen dan berfungsi mengawasi jalannya eksekutif. Tetapi, praktisi posisi Majelis sebenarnya lemah

di hadapan Dewan Pengawal yang selalu didominasi ulama garis keras dan dapat menganulir keputusan Majelis berdasarkan konstitusi.

Peran ketiga, dinamika politik Iran dewasa ini diwarnai oleh dua kekuatan utama yang saling berebut mengubah masa depan Iran. Mereka adalah kalangan konservatif dan reformis. Kubu konservatif adalah kubu yang mengendalikan lembaga-lembaga paling strategis dalam sistem pemerintahan Iran yang didominasi oleh mullah dan ulama senior, yang selalu berpegang tegus pada velayat-e-faqih dalam menjalankan pemerintahan, dan cenderung kurang luwes dalam menterjemahkan prinsip-prinsip dasar konstitusi Iran.

Kubu kedua adalah kalangan reformis yang didominasi oleh para ulama muda yang cenderung berfikir lebih luwes dan populistik, berfikir demokratis dan menerima pemikiran liberal sepanjang tidak keluar dari konteks Islam. Tokoh reformis Iran yang terkenal adalah Rafsanjani dan Khatami (Presiden Iran sekarang).

Perseteruan antara dua kubu disebabkan perebutan pengaruh kekuasaan, dimana kaum konservatif tetap berupaya keras mempertahankan *status quo*-nya dari tangan-tangan kubu reformis. Perseteruan tersebut dipicu oleh dua hal yaitu pandangan-pandangan sangat liberal reformis yang menyentuh

kesakralan velayat-e-faqih. Hal itu terbukti dengan kebijakan pintu terbuka Khatami yang membuat kalangan konservatif sangat risau. Bahkan sewaktu Nateq Nuri (capres) kubu konservatif mengkampanyekan agar rakyat Iran kembali kepada prinsip dasar velayat-e-faqih, Khatami, capres reformis menyatakan bahwa rakyat Iran berhak untuk menterjemahkan faqih sesuai dengan perkembangan zaman.

Pemicu kedua, maksimalisasi tiga kekuatan yang menjadi penggerak kehidupan demokrasi di Iran saat ini yaitu ulama, intelektual (mahasiswa) dan wanita oleh kaum reformis dibawah komando Khatami, sehingga rakyat banyak mendukung program-program Khatami yang memberi nuansa baru bagi mereka. Ke tiga kekuatan inilah yang paling mungkin diharapkan karena partai politik merupakan barang haram di Iran. Selain itu perluasan media massa dan peran wanita di berbagai bidang kehidupan dan mendorong berbagai dialog publik untuk membantu terbentuknya demokratisasi di Iran.

Akan tetapi, kemenangan kubu reformis dalam memperoleh dukungan rakyat Iran menimbulkan guncangan dalam tubuh konservatif. Kubu konservatif memulai serangan balik atas kekalahan dalam perebutan kursi presiden 1997 dengan serangkaian tindakan represif. Korban pertama dari kubu

reformis adalah ayatollah Montazeri yang dikenai tahanan rumah, akibat tuduhan menghina Ketua Tertinggi Republik Iran, Ayatollah Khomeini.

Media massa pun menjadi sasaran empuk kubu konservatif. Majalah atau koran yang mereka pandang terlalu liberal langsung ditutup dan hanya boleh dibuka kembali dengan menggunakan nama lain, karena telah memuat tulisan-tulisan yang bertentangan dengan pesan-pesan dasar revolusi Iran. Serangan paling keji ditujukan kepada beberapa penulis yang rajin mengkritik kebijakan kubu konservatif. Sembilan penulis ditemukan dalam keadaan meninggal, karena tikaman senjata tajam atau digantung atau hilang tak tentu rimbanya, dalam kurun waktu 18 bulan pertama pemerintahan Khatami.

Orang dekat Khatami sekaligus mantan pejuang dalam perang Iran-Iraq, profesor Hashem Aghajari, harus rela meringkuk di penjara setelah mendapat hukuman vonis mati kubu konservatif yang ditentang keras Khatami beserta mahasiswa di Universitas Teheran, akibat pernyataan Aghajari bahwa manusia bukanlah hewan yang hanya bisa meniru sebagaimana seekor kera.

Tekanan dan tindakan represif kubu konservatif membuat rakyat Iran semakin kuat mendukung agenda kaum reformis, yang tetap mengedepankan kebebasan, dialog dan toleransi yang

merupakan kebutuhan-kebutuhan manusia yang paling azasi, serta menolak dogmatisme, konservatisme dan represi politik. Peran ulama, intelektual dan wanita sebagai komponen penggerak demokrasi Iran tidak bekerja secara sistematis, karena kerjasama yang erat sangat mustahil dalam rejim mullah garis keras. Sekalipun demikian, meskipun ketiganya terpisah, masing-masing relatif berhasil menebar bibit gerakan pro-demokrasi dalam lapisan tipis masyarakat Iran dibawah tekanan kaum konservatif.

Demokrasi Iran adalah sebuah eksperimen yang sangat mahal. Terbukti dengan pengorbanan yang sangat besar dari para aktifisnya. Mereka mengalami penderitaan moral dan siksaan fisik, bahkan sebagian diantaranya harus rela menjumpai maut demi memperjuangkan sebuah sistem yang mereka impikan. Hingga detik ini, agenda kubu reformis Iran yang berjuang menegakkan demokrasi Islam masih belum berjalan mulus, mereka harus berhadapan dengan agenda kubu garis keras yang mengendalikan posisi strategis dalam pemerintahan Republik Islam Iran.

Demokrasi sesungguhnya bukan barang aneh bagi ummat Islam bahkan bagi para ulama sekalipun. Peran ulama dalam proses demokrasi Iran merupakan sebuah fenomena yang sangat

menarik dan merupakan bentuk penolakan terhadap asumsi bahwa hanya politisi sekuler yang berhak bermain dalam politik. Sebaliknya, kekuasaan tak terkontrol berpotensi mengubah ulama menjadi politisi berhaluan keras ditambah lagi dengan keengganan ulama melakukan analisis dan penafsiran kembali teks-teks Al-Qur'an dan ajaran Khomeini, menumbuhkan konservatifme cara berfikir. Kerancuan berfikir inilah yang menciptakan peluang bagi munculnya tindakan dan kebijakan otoriter, serta memberi legitimasi bagi kubu garis keras untuk melakukan kekerasan politik, sebagai bahasa paling akhir saat bahasa hukum mereka anggap tidak terlalu penting. ***

Iskandar Zulkarnain, Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional UMY